

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Faktor Penghambat Implementasi Perda Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Kantor Di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang

¹Sahnaz Filia Fauzi Putri, ²Ida Farida, ³Ane Septiyani, ⁴Sinta Dwi Lestari, ⁵Arip Rahman Sudrajat

¹²³⁴⁵STIA Sebelas April Sumedang

e-mail : ¹sahnazvocalist@gmail.com, ²faridaprakasa04@gmail.com,

³aneseptiyani@yahoo.co.id, ⁴sintadwilestari55@gmail.com, ⁵arip.rs84@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan dalam penyusunan Laporan ini adalah Metode Penelitian Kualitatif, Teknik Sampling yang digunakan adalah Probability Sampling Sedangkan dalam menganalisis data dipergunakan Model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah : Reduksi Data, Penyajian Data, Concluding Drawing/ Verification, dan Triangulasi, serta Validasi Data. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa faktor penghambat seperti kurang menyeluruhnya sosialisasi, kurangnya pengawasan pemimpin dan tidak tersedianya fasilitas penunjang KTR. Dan upaya yang dibutuhkan dalam mengatasi faktor penghambatnya adalah pemberian sosialisasi bagi seluruh pegawai, adanya pengawasan yang intens dari pemimpin dan pihak berwenang, lagu segera disediakan fasilitas bagi pegawai yang merokok (Smoking Area).

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, faktor-faktor penghambat implementasi dan upaya-upaya dalam mengatasi faktor penghambat implementasi.

Inhibiting Factors for Implementation of Regional Regulation Number 17 of 2014 Concerning Offices in BAPPPEDA of Sumedang Regency

Abstract

This study aims to determine the inhibiting factors for the implementation of Regional Regulation No. 17 of 2014 concerning No-Smoking Areas (KTR) in the Office of the Development Planning and Development Agency of Sumedang Regency. The method used in the preparation of this report is a Qualitative Research Method, the Sampling Technique used is Probability Sampling. While analyzing the data the Miles and Huberman Models are used with the following steps: Data Reduction, Data Revelation, Conclusion Drawing / Verification, and Triangulation, and Data Validation . Based on the results of research conducted there are several inhibiting factors such as lack of thorough socialization, lack of supervision by leaders and unavailability of KTR supporting facilities. And the effort needed to overcome the inhibiting factors is the provision of socialization for all employees, the existence of intense supervision from leaders and authorities, the song immediately provided facilities for employees who smoke (Smoking Area).

Keywords: *Implementation of policies, factors inhibiting implementation and efforts to overcome impeding implementation factors.*

A. PENDAHULUAN

Manusia memiliki berbagai macam kebiasaan mulai dari berolahraga, membaca, menulis, mengarang, dan sebagainya. Diantara sekian banyak kebiasaan manusia, ada salah

satu kebiasaan manusia yang sangat merugikan bagi kesehatan mereka. Kebiasaan yang tidak baik ini sering dilakukan oleh masyarakat kita, yakni kebiasaan merokok. Jumlah perokok di Kabupaten Sumedang cukup signifikan,

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

menurut survey sosial ekonomi daerah (SUSEDA) Jawa Barat Tahun 2008, di Kabupaten Sumedang terdapat 293.932 penduduk usia 10 tahun keatas yang merokok. Jumlah tersebut mencapai 25% dari jumlah penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2008. Besarnya jumlah perokok di Kabupaten Sumedang, menimbulkan resiko paparan asap rokok yang cukup tinggi baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif.

Guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga dapat hidup produktif secara sosial ekonomis dan dalam rangka perlindungan HAM serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Sumedang mengeluarkan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sebagai penerapannya, dilaksanakannya sosialisasi Perda tersebut di Gedung Negara yang pembukaannya dibuka oleh Asisten Pembangunan H Dede Hermasyah. Dalam laporan Kasubag Perundang-undangan pada bagian Hukum Agus Ridwan disebutkan, maksud sosialisasi adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparaturnya mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sedangkan tujuannya adalah untuk menciptakan ruangan dan lingkungan yang bersih dan sehat, melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok, dan menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, ternyata diketahui bahwa penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) di kabupaten Sumedang belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok di kantor BAPPPEDA sudah jelas diterapkan dengan adanya Perda No 17 tahun 2014, hanya saja tujuannya belum begitu terperinci, kurang dipahami oleh para pegawai yang merokok di dinas tersebut dan keberatannya pegawai atas peraturan yang ada dikarnakan sarana prasarannya pun seperti smoking area sampai saat ini belum juga dibuatkan, kemudian kurangnya juga pengawasan

dari eksternal maupun internal. Sehingga penyebab dari timbulnya kegagalan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Merokok di kantor dinas BAPPPEDA masih terjadi kurang-kekurangan, seperti selalu dilanggarnya oleh pegawai dengan merokok ditempat pekerjaan mereka sendiri.

2. Informasi yang didapat hanya berupa edaran yang hanya di bagikan dibagian pengumuman dan surat edaran kesetiap bidang saja, jadi membuat kurangnya komunikasi antar pihak berwenang kepada pegawai.
3. Adanya dukungan dari dinas kesehatan dan dari pihak eksternal lainnya hanya saja kurangnya pengawasan dari pihak eksternal keseluruhan pegawai, pengawasan ini hanya diajukan kepada pimpinan saja.
4. kurangnya dukungan dari internal yang dimana tergantung tipe pemimpin dan gaya kepemimpinan yang berbeda. Ini berpengaruh terhadap aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam Laporan Praktek Penelitian Administrasi dengan judul : Faktor - Faktor Penghambat Implementasi Perda Nomor. 17 Tahun 2014 Tetang Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Di Bapppeda Kabupaten Sumedang.

Dengan permasalahan diatas dapat diambil beberapa fokus permasalahan yaitu :

1. factor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi perda nomor 17 tahun 2014 mengenai KTR?
2. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan guna mengatasi factor penghambat tersebut?

B. PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan

Sebelum kita mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan bagaimana upaya untuk mengatasi factor penghambat implemetasi kebijakan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu implementasi kebijakan.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Alfatih (2010:15) menyatakan implementasi kebijakan adalah penerapan apa yang diamanahkan oleh suatu kebijakan secara baik dan benar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2006:139) menjelaskan makna implementasi, yaitu :

"Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mendefinisikan masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya".

Faktor – faktor Penghambat Implementasi

Dalam melaksanakan suatu kebijakan akan menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi tergantung dengan tempat maupun orang yang terdapat didalam suatu organisasi tersebut.

Menurut Sunggono (1994:149 – 153) , implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat yaitu :

1. Isi kebijakan

Samarnya isi kebijakan, kurang ketetapan item maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti, kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya, dan sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2. Informasi

3. Dukungan

4. Pembagian potensi

4 faktor diatas sangat lah mempengaruhi dalam pengimplementasian kebijakan bukan hanya untuk kebijakan KTR tapi berpengaruh juga untuk penerapan kebijakan-kebijakan lainnya.

Di BAPPPEDA sendiri faktor penghambat diatas menjadi permasalahan mengapa sulitnya menerapkan Perda no 17 tahun 2014 mengenai KTR.

1. Kurangnya pemahaman dari isi kebijakan KTR oleh para pegawai yang ada di BAPPPEDA, dan tidak tersedianya *Smoking Area* yang diperuntukan bagi para pegawai yang merokok.
2. Kurang menyeluruhnya pemberian sosialisasi sehingga hanya beberapa pegawai yang mengetahui tentang kebijakan KTR.
3. Kurangnya pengawasan dari pihak ekKurangna pengawasan dari pihak eksternal yang berwenang sehingga hanya di limpahkan terdapa pimpinan.
4. Kurangnya pengawasan internal terkait dengan tipepria tergolong lebih santai dalam menanggapi pegawai yang merokok dari pada pimpinan wanita yang cenderung lebih cerewet mengenai haada pimpinan wanita yang cenderung lebih cerewet mengenai hal merokok.

Upaya-Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Dari faktor-faktor penghambat tersebut dibutuhkan pula beberapa upaya dalam pengimplementasian kebijakan.

Adapun menurut Sunggono (1994:148) unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan.
- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum.
- d. Warga masyarakat sebagai objek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

Jadi bila dapat disimpulkan dari obeservasi yang dilakukan penulis di BAPPPEDA bahwa dalam pengimplentasian KTR dibutuhkan upaya-upaya seperti dibutuhkannya sosialisasi yang lebih menyeluruh agar para pegawai memahami

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

peraturan dari kebijakan tersebut, dibutuhkan ketegasan petugas yang berwenang dalam pelaksanaan KTR, lalu tersedianya fasilitas penunjang seperti *Smoking Area* agar mempermudah berjalannya kebijakan dan yang paling penting adalah memupuk kesadaran masyarakat agar lebih mematuhi kebijakan yang telah di sediakan oleh pemerintah guna kebaikan masyarakat itu sendiri.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, kurangnya pemahaman pegawai mengenai isi kebijakan, ada sosialisasi pihak yang bewenang tetapi tidak menyeluruh untuk pegawai, kurangnya pengawasan dari pimpinan dan dinas yang berwenang akan PERDA tersebut, lalu tidak adanya fasilitas untuk para pegawai yang merokok (*Smoking Area*). Dengan demikian penulis menarik kesimpulan bahwa faktor utama yang menjadi penghambat implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah kurangnya pengawasan dari pihak berwenang kepada jalannya pelaksanaan kebijakan dan ketidak adaannya fasilitas penunjang (*Smoking Area*) untuk pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Dan upaya yang dibutuhkan untuk mengatasi faktor penghambat implementasi adalah adanya penjelesan yang menyeluruh terhadap pegawai mengenai kebijakan tersebut, disediakan fasilitas yang memadai untuk para pegawai yang merokok (*Smoking Area*), dan adanya pengawasan yang intens dari pemimpin dan pihak yang berwenang terhadap kebijakan tersebut.

Rekomendasi

1. Diberikannya sosialisasi yang menyeluruh mengenai kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) No. 17 Tahun 2014 mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) terutama bagi pegawai yang merokok, bila di perlu

diberikan punishment dan juga reward dalam upaya meningkatkan kesadaran pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA).

2. Segera disediakan *Smoking Area* agar pegawai yang merokok tidak merokok disembarang tempat, dan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.
3. Peningkatan pengawasandari pimpinan dan juga adanya pengawasan yang intens dari pihak yang berwenang.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Alfatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. UNPAD Press.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Textid. "Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan". 19 Desember 2018.
<https://text-id.123dok.com/document/ozlr7o4oz-faktor-penghambat-implementasi-kebijakan-upaya-mengatasi-hambatan-implementasi-kebijakan.html>
- Tempo.co."Pemerintah Targetkan 50% Kota Terapkan Kawasan Tanpa Rokok". 30 Desember 2018.
<https://nasional.tempo.co/read/875885/pemerintah-targetkan-50-persen-kota-terapkan-kawasan-tanpa-rokok/full?view=ok>